

Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan
14 September 2019, Hal. 341-350
ISSN: 2686-2972 ; e-ISSN: 2686-2964

Peran perempuan dalam pemilihan umum di era demokrasi

Anom Wahyu Asmorojati, Muhammad Nur

Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Ringroad Selatan, banguntapan, Bantul, DIY
Email: anom.asmorojati@law.uad.ac.id

ABSTRAK

Perempuan yang awalnya berperan sebagai pelengkap sekarang mengambil peran baik secara kuantitas maupun kualitas dalam proses politik ditingkat kebijakan dan keputusan strategis terkait pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa perempuan memiliki posisi yang tidak kalah penting dalam pengambilan keputusan terutama dalam bidang politik. Namun ketidakpahaman perempuan dengan aturan berpolitik dapat merugikan diri sendiri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pendidikan politik dan hak-hak politik dan ketrampilan berpolitik praktis kepada ibu-ibu PCA Banguntapan Utara Sasaran utama pelatihan adalah perempuan anggota PCA Banguntapan Utara. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah, diskusi, praktek dengan materi pengabdian terdiri dari peran perempuan dan pendidikan politik. Hasil dari kegiatan pengabdian ini ialah perubahan pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam pemahaman berpolitik yang baik dan benar sesuai dengan perannya. Luaran kegiatan pengabdian ini adalah jurnal nasional, video kegiatan, dan publikasi dalam koran.

Kata kunci: Peran Perempuan, Pendidikan Politik, Demokrasi

ABSTRACT

Women who initially served as complementary are now taking roles both in quantity and quality in the political process at the level of policies and strategic decisions related to the socio-economic development of society. From this statement it can be seen that women have an equally important position in decision making, especially in the political field. But the lack of understanding of women with political rules can be detrimental to themselves. Community service activities aimed at providing knowledge about political education and political rights and practical political skills to PCA Banguntapan Utara mothers. The main target of the training was women members of PCA Banguntapan Utara. The method of carrying out activities includes lectures, discussions, and practice with devotion consisting of the role of women and political education. The result of this community service activity is a change in women's knowledge and skills in political engagement that is good and right according to their role. The outputs of this community service activity are national journals, activity videos, and publications in newspapers

Keywords: *the role of women, political education, democracy*

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam ranah publik menjadi hal yang tidak akan habis untuk didiskusikan. Hal tersebut dikarenakan isu mengenai perempuan adalah topik yang hangat dibicarakan sejak jaman sebelum merdeka hingga saat ini. Bahkan dalam kehidupan modern, perempuan hanya dianggap sebagai, “konco wingking”, warga kelas dua, atau pelengkap baik diranah domestik maupun publik. Perkembangan jaman yang semakin modern ini menuntut perempuan lebih aktif memperlihatkan perannya dalam ranah publik seperti keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi keluarga. Keaktifan perempuan dalam ranah publik saat ini tidak hanya menyangkut bidang ekonomi.

Secara perspektif domestik peran perempuan terbagi menjadi tiga yaitu, peran tradisional, peran transisi, dan peran kontemporer. Dalam peran tradisional, perempuan memiliki tugas mengerjakan pekerjaan domestik yang kaitannya dengan rumah tangga, mendidik, dan mengasuh anak yang didasarkan pada keterikatan anak sejak dalam kandungan. Sedangkan peran transisi, perempuan memiliki fungsi ganda menjadi ibu rumah tangga sekaligus sebagai pendukung sektor ekonomi dalam upaya mendukung pendapatan keluarga. Berbeda dengan peran kontemporer yang menunjukkan peran perempuan sebagai wanita karier sebagai bentuk aktualisasi diri di luar rumahtangga [1].

Perempuan yang memiliki kesempatan melakukan aktualisasi diri merupakan bentuk dari peran sosial. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat suatu penelitian bahwa peran gender perempuan dibagi menjadi tiga yaitu peran produktif, peran domestik, dan peran sosial. Peran produktif sama dengan peran transisi, peran domestik hampir sama dengan peran tradisional, sedangkan peran sosial lebih menekankan pada peran ibu rumah tangga yang dapat mengaktualisasikan diri dalam masyarakat [1].

Berdasarkan pembagian peran perempuan diatas, peran transisi atau produktif saat ini menjadi peran yang sangat dominan dilakukan. Dari data yang dikeluarkan oleh BPS pada jumlah perempuan bekerja mengalami peningkatan sebesar 2,33% data tersebut diperoleh pada Februari 2016 sebesar 52,71% naik menjadi 55,04% di Februari 2017 [2]. Peningkatan ini memiliki dua sisi secara positif perempuan semakin aktif mengambil bagian dalam mendukung perekonomian nasional dan memiliki kesempatan lebih besar dalam bidang pekerjaan. Namun disisi lain peningkatan peran perempuan dalam ranah publik dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memperoleh simpati.

Jumlah perempuan yang mulai memasuki ranah publik menjadikan perempuan objek strategis sebagai penggerak karena mereka memiliki jangkauan yang sangat luas. Peluang ini dilihat baik di bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, bahkan politik yang didominasi oleh kaum laki-laki. Ada pendapat bahwa perempuan yang awalnya berperan sebagai pelengkap sekarang mengambil peran baik secara kuantitas maupun kualitas dalam proses politik ditingkat kebijakan dan keputusan strategis terkait pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa perempuan memiliki posisi yang tidak kalah penting dalam pengambilan keputusan [3].

Peran perempuan menjadi lebih kentara dalam era demokrasi belakangan ini terutama dalam pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden. Suara perempuan ternyata memiliki jumlah yang sangat besar, berdasarkan data yang diterbitkan KPU jumlah pemilih laki-laki baik didalam maupun diluar negeri sebanyak 95.368.749 pemilih dan perempuan sejumlah 95.401.580. Jumlah pemilih yang sangat besar tersebut menjadikan suara perempuan dianggap sebagai penentu kemenangan pasangan calon [4]. Eksistensi perempuan semakin terlihat dan hal tersebut merupakan hal yang wajar tidak hanya karena menang dalam jumlah namun juga disebabkan perempuan memiliki hak yang sama dalam aktualisasi diri dalam segala bidang salah satunya politik.

Suara perempuan menjadi sangat penting karena perempuan memiliki berbagai peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Peran ganda tersebut dilakukan perempuan secara

bersamaan yaitu menjadi ibu rumah tangga sekaligus wanita karier yang berproduktif. Partisipasi perempuan juga tidak hanya menjangkau bidang ekonomi namun juga memiliki kesempatan dalam bidang lain. khususnya di dunia politik perempuan memiliki kesempatan yang cukup besar untuk terlibat secara aktif. Hal tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik [5], dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kesemuanya mengatur agar kuota perempuan terpenuhi sebanyak 30% [6] .

Proporsi 30% tersebut cukuplah besar bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuannya dalam peran transisi atau produktif dalam bidang politik. Bahkan pemilu tahun 2019 perempuan dijadikan sebagai salah satu isu utama dalam mencari suara. Hal tersebut didasarkan pada peran perempuan baik dalam bidang domestik yang memiliki kemampuan afirmatif mempengaruhi anggota keluarga sekaligus peran produktif, karena para perempuan saat ini lebih cenderung memiliki kemampuan dalam mendukung kemampuan ekonomi baik didalam ranah domestik maupun perkeonomiannasioanal.

Pemanfaatan perempuan dalam dunia politik bukanlah pelanggaran hukum, akan tetapi penyalahgunaan suara tanpa didasari oleh kaum perempuan akan merugikan dirinya sendiri. Sebagaimana kasus yang sedang ramai diperbincangkan terkait video tiga perempuan yang melakukan kampanye *door to door*. Berdasarkan berita yang dilansir oleh www.tempo.com, ketiga perempuan tersebut terseret dalam ranah hukum dan telah dilakukan pengamanan oleh pihak berwajib [7]. Berdasarkan pernyataan dalam wawancara tersebut, Prof. Dr. Machfud MD Mantan Ketua MK menyampaikan bahwa ketiga perempuan tersebut memang bukan pelanggaran kampanye namun kegiatan yang dilakukan telah melanggar hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman akan pendidikan politik dikalangan masyarakat terutama perempuan yang awalnya hanya memiliki peran tradisional sebagai ibu rumah tangga.

Pendidikan politik sangat diperlukan bagi masyarakat awam apalagi dalam waktu menjelang pemilihan umum. Tujuan dari pendidikan politik bukan menjadikan masyarakatmenjadisinpatisan,calon legislatif, ataupun tim sukses salah satu pasangan calon. Pendidikan politik diberikan agar masyarakat pada umumnya dan perempuan khususnya dapat kritis dalam mencermati program kerja yang ditawarkan dan menjadi pemilih yang cerdas. Selain itu bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk mendukung pasangan calon dapat terhindar dari pelanggaran kampanye ataupun hukum.

PCA sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki peran dapat memberikan edukasi kepada perempuan terutama dalam bidang politik. Sebagaimana yang kita ketahui PCA sebagai ortom dibawah Muhammadiyah secara kuatitas jumlah tidak dapat dipandang sebelah mata begitu pula dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Secara aturan warga Muhammadiyah tidak diperkenankan mendukung salah satu paslon namun juga tidak melarang warganya untuk golput. Pada kondisi tersebut para perempuan khususnya di PCA Banguntapan merasakan perlunya pemahaman pendidikan politik agar mereka dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakatsosial.

Pemahaman tersebut dianggap perlu karena perempuan dengan peran ganda yang disebut peran transisi atau produktif dibawah naungan PCA diharapkan tidak menjadi objek saja dalam perolehan suara salah satu paslon. Upaya yang telah ditempuh PCA adalah memiliki bidang Hukum dan HAM namun pendidikan politik belum terjamah sama sekali. Oleh karena itu diperlukan pelatihan yang mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan peran perempuan dalam bidang politik agar mereka tidak menjadi objek untuk menambah suara.

Adapun tujuan program pelatihan peran perempuan dalam pemilihan umum di era demokrasi ini antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perempuan tentang pendidikan politik.

2. Mengembangkan kemampuan perempuan tentang perannya dalam dunia politik.
3. Meningkatkan dan memperluas wawasan perempuan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang politik
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik di era globalisasi

METODE

Pelaksanaan pelatihan digunakan beberapa metode agar selama proses pelatihan peserta lebih memahami materi dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Metode adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran [8]. Berikut ini metode yang digunakan selama proses pelatihan [9]:

1. Ceramah
Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara lisan atau *verbal* dengan media suara dan fasilitator. Dalam pelatihan ini metode ceramah digunakan ketika diawal sesi untuk menyampaikan materi secara umum.
2. Diskusi
Metode ini merupakan metode yang melibatkan dua individu atau lebih untuk saling bertukar informasi secara verbal, dengan saling berhadapan, saling mempertahankan pendapat dengan tujuan memecahkan sebuah masalah. Penggunaan metode ini selama pelatihan dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada peserta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi mitra.
3. Praktek
Metode ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan pengalaman langsung kepada peserta tidak hanya memberikan instruksi serta penjelasan materi di depan kelas namun kegiatan juga dilakukan dengan praktek langsung. Metode ini digunakan pada saat kegiatan inti pelatihan disetiap sesi.

Berdasarkan garis besar usulan solusi tersebut, kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan yang berisi detail langkah-langkah dari solusi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada mitra. Kegiatan dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dengan jumlah jam 16 jam. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2019 bertempat di gedung dakwah Muhammadiyah Sorowajan, Banguntapan, Bantul. Berikut ini rincian kegiatan pelatihan yang diselenggarakan:

1. Peran Perempuan Dalam Politik dan Pemilu di Era Demokrasi(2 sesi)
Materi pelatihan pada sesi ini adalah pengenalan peran perempuan yang terbagi menjadi 3 yaitu peran perseptif domestik peran perempuan terbagi menjadi tiga yaitu, peran tradisional, peran transisi, dan peran kontemporer, dengan metode ceramah interaktif dengan peserta Pendidikan Politik Bagi Perempuan (4sesi)
Materi pelatihan pada bagian ini adalah peran yang dapat dilakukan perempuan dalam bidang politik baik dalam rumah tangga maupun ranah publik. Sesi 2 menyampaikan materi tentang peran perempuan dalam pemilihan umum di era demokrasi. Metode pelaksanaan dalam sesi ini adalah diskusi interaktif dan tanya jawab\.
2. Perempuan dan Media Sosial (2 sesi)
Materi dalam pelatihan ini adalah contoh dan praktek penggunaan media sosial untuk sarana komunikasi politik oleh perempuan Metode pelaksanaan dalam sesi ini adalah diskusi inetraktif dengan memberikan contoh-contoh pemanfaatan media sosial secara benar dalam berpolitik ,misalnya penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye pemilihan umum.

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pendekatan andragogi dengan menerapkan pola diskusi. Paparan teori atau ceramah lainnya dilakukan sebagai sisipan untuk memperkaya materi dalam proses diskusi atau pengambilan kesimpulan. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di PCA Banguntapan dengan jumlah peserta sebanyak 30 anggota PCA. Proses pelatihan juga menuntut peserta untuk praktek membuat dan mengembangkan produk sebagai hasil pemahamannya terhadap materi pelatihan. Peranan mitra dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan program, mitra akan memberikan partisipasi utamanya sebagai peserta dari setiap pelatihan maupun aktivitas pengabdian lain yang diusulkan.
2. Mitra akan menerapkan pengetahuan dari pelatihan
3. Mitra juga akan mengimplementasikan hasil pengembangan wawasan dari pelatihan dan hasilnya akan dicatat untuk dijadikan bahan evaluasi

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pelatihan ini ditujukan kepada anggota PCA dan PRA Banguntapan Utara yang aktif melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di Banguntapan Utara. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta bertempat di gedung dakwah Muhammadiyah Wonocatur. Indikator keberhasilan pelatihan ini dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu, jumlah peserta yang hadir dalam workshop, perubahan pengetahuan dan keterampilan, dan implementasi hasil pelatihan, serta dampak yang diperoleh.

PCA Banguntapan Utara sendiri memiliki 7 majelis yaitu Majelis Tabligh, Majelis Dikdasmen, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Majelis Kesehatan, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Pembinaan Kader, dan Majelis Hukum dan HAM. Peserta sejumlah 30 orang diambil dari perwakilan majelis-majelis tersebut dan perwakilan Pimpinan Ranting di Banguntapan Utara.

Indikator keberhasilan kedua adalah adanya perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam bidang poltik. Pemahaman awal peserta mengenai pendidikan politik tampak pada beberapa pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Pada awalnya peserta belum banyak yang memahami dan memiliki pengetahuan tentang perannya dalam bidang tradisional,transisi dan kontemporer, yang mencakup pula bidang politik.

Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang memberikan ruang kepada perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang politik. Setelah mendapatkan materi dan penjelasan mengenai pentingnya peran perempuan dalam bidang politik, maka banyak peserta yang kemudian berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar peran perempuan dalam bidang politik. Pada materi mengenai perempuan,politik dan media sosial, antusiasme peserta semakin meningkat.

Pemaparan mengenai penggunaan media sosial secara baik dan benar dalam bidang politik sangat menarik perhatian peserta. Banyaknya informasi yang diterima melalui media sosial yang berkaitan dengan politik sangat mempengaruhi pola pikir orang menerima informasi tersebut. Namun sayangnya berita-berita yang tersebut belum tentu kebenarannya sehingga banyak beredar berita palsu atau hoaks yang sangat meresahkan terutama menjelang tahun-tahun politik seperti tahun ini pada saat menjelang pemilihan presiden,pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan kepala daerah.

Banyaknya informasi-informasi palsu yang beredar melalui media sosial tentu sangat meresahkan,karena jumlah perempuan yang menggunakan media sosial semakin meningkat. Data menunjukkan, keterlibatan perempuan dalam pemilu semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2004,keterlibatan perempuan dalam pemilu hanya 11,8% saja, namun seiring waktu pada tahun 2019 keterlibatan perempuan dalam pemilu telah mencapai 40%. berdasarkan data tersebut tampak bahwa peran perempuan di era demokrasi ini memang

dituntut lebih aktif dan berkualitas. Pendidikan politik bagi perempuan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam berpolitik praktis yang benar dan tidak melanggar hukum.

Pendidikan politik bagi perempuan sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara dan tahapan, diantaranya :

1. Pendidikan dari keluarga

Pendidikan politik dalam lingkungan non formal ini juga harus diterapkan, seperti adanya keterlibatan keluarga dalam mendorong anggota keluarganya untuk mau diajak berbicara politik dan berdiskusi dengan tema-tema politik yang ada di tengah masyarakat.

2. Aktif berorganisasi bagi anak perempuan

Anak perempuan yang mengikuti pendidikan politik dasar sejak disekolah menengah sampai Universitas, didorong untuk aktif mengikuti organisasi seperti OSIS, BEM, dan organisasi ekstra universitas seperti HMI, GMNI, organisasi pemudaseperti KNPI, dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Maka berarti secara sadar kaum perempuan telah mempersiapkan diri menjadi pemimpin.

3. Melalui advokasi

Memberikan penyadaran akan pemenuhan hak yang adil bagi kaum perempuan dalam setiap keputusan-keputusan politik, sehingga mendorong partisipasi perempuan masuk ke dalam dunia politik dengan tujuan agar dalam pengambilan keputusan politik perempuan mempunyai andil di dalamnya untuk memperjuangkan kaumnya.

4. Pendidikan sejak dini

Mempersiapkan anak-anak perempuan sejak dini untuk terpanggil dan tertantang memasuki dunia politik melalui kurikulum pendidikan yang berbasis pada pengenalan politik sejak dini. Cara ini akan memberi dampak pada masa depan yang semakin banyak perempuan berkiprah dan berpartisipasi di kancah politik.

5. Memberi pencerahan

Penyadaran dan dorongan kepada kaum perempuan supaya dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, pemilihan, menjadi calon legislatif, calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, dan lain sebagainya

Berdasarkan hasil pelatihan yang telah dilakukan, pihak PCA Banguntapan Utara menginginkan adanya kegiatan semacam pelatihan dan penyuluhan pendidikan politik dilakukan secara rutin untuk ibu-ibu PCA Banguntapan Utara. Hal tersebut untuk merespons perkembangan demokrasi yang menuntut meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik. Pelatihan diharapkan tidak hanya bagi ibu-ibu PCA namun juga untuk perempuan-perempuan muda yang tergabung dalam organisasi Nasyiatul Aisyiyah (NA) sehingga pendidikan politik bagi perempuan dapat diberikan lebih dini. Setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan, peserta menjadi lebih memahami dan punya kesadaran pentingnya pendidikan politik bagi perempuan di era demokrasi saat ini, hal tersebut tampak dari diskusi yang berkembang dan berjalan dengan dinamis, dan banyak muncul



Gambar 1 : Sebagian Peserta Pelatihan pada saat berfoto bersama pemateri



Gambar 2 : Suasana diskusi pada sesi 1



Gambar 3: Pemateri sedang menyampaikan materi pelatihan



Gambar 4 : Sesi diskusi dan tanya jawab



Gambar 5: Sesi diskusi dan tanya jawab

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Pelatihan Peran Perempuan Dalam Pemilu di Era Demokrasi yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019 bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Wonocatur, Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa pengetahuan peserta akan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan dan penggunaan media sosial dalam bidang politik bagi perempuan masih minim. Antusiasme peserta selama kegiatan pelatihan berlangsung sangat tinggi, hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dan diskusi yang sangat menarik yang melibatkan hampir seluruh peserta pelatihan. Pemanfaatan teknologi informasi secara baik dan benar sangat dibutuhkan bagi perempuan terutama dalam upaya meningkatkan perannya dalam bidang politik. Kerjasama yang solid antara PCA Bambanglipuro, dan LPPM UAD selama proses pelaksanaan program sehingga berjalan sesuai dengan rencana. Pada akhirnya kerjasama ini dapat meningkatkan antusiasme peserta untuk lebih jauh tentang politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami haturkan terimakasih yang tulus kepada ibu Hj Warjilah, S.Pd (Ketua PCA Banguntapan Utara) yang telah mendukung penuh kegiatan pelatihan ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hubeis, Aida Vitayala S., (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press, Bogor.
- [2] Midayanti, N. (2018). *Keadaan Ketengakerjaan Indonesia Februari 2018*. Badan Pusat Statistik, Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Jakarta: BPS.
- [3] Sutrisno, L. (1996). *Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: UGM Press.
- [4] Mujib, I. L. (2018, Desember 18). *www.idntimes.com*. (Sunariyah, & Rochmanudin, Editors) Retrieved Februari 22, 2019, from <https://www.idntimes.com/news:https://www.idntimes.com/news/indonesia/ilyas-listianto-mujib-1/dpt-pemilu-2019-pemilih-perempuan-lebih-banyak-dari-laki-laki>.
- [5] Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- [6] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- [7] Nurita, D. (2019). *www.tempo.co*. (R. Widiastuti, Editor) : Retrieved Februari 27 from www.nasional.tempo.co : <https://nasional.tempo.co/read/1180150/kata-mahfud-md-soal-kasus-3-ibu-kampanye-hitam-jokowi> .
- [8] Djamarah & Zain. (2006). *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- [9] Sanjaya, Wina. (2006) “Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan”. Bandung: Kencana.

